

RUMAH GARUDA: MODEL PEMBUDAYAAN NILAI-NILAI PANCASILA MELALUI MEDIA KREATIF

Hastangka Hastangka

MKWU Pancasila, Universitas Mercu Buana Yogyakarta
Jl. Ring road utara, Condong catur, Yogyakarta
Email: hastangka@gmail.com

Abstract

Finding the right and ideal model and formulation in cultivating Pancasila values in the post-reform era has become an important interest in Pancasila studies today. Cultivating the value of Pancasila in this era that undergoes rapid dynamic changes and development is challenging. The country faces the deterioration of Pancasila values which leads to a lack of love for the homeland and also triggers the emergence of intolerance movements, radicalism, fundamentalism, corruption, and terrorism in this country which we ironically called the nation of Pancasila. The way Pancasila values should be cultivated and implemented by the government and the society is still questionable. The lack of ideal and right models is considered as the root of problems in the cultivation of Pancasila values. In addition, many programs run by the government in cultivating Pancasila values are still flawed. It is found that different approaches and materials are implemented among institutions. This confuses the society regarding which values they should implement. This research is a critical study of many concepts and Pancasila cultivation models that are developing in this post-reform era, and also of alternative models of Pancasila cultivation that need to be formulated. This research uses a qualitative approach. The data are obtained from observation and interviews, as well as literature reviews. The data analysis used in this research is the critical discourse analysis, interpretation, and inductive-deductive. The result of the research shows that cultivating Pancasila values can be done through creative media. Rumah Garuda is one of the places that is able to develop the formula and formats, and become the right and ideal creative media in cultivating Pancasila values.

Keywords: Rumah Garuda; Pancasila; Cultivation; Creative Media.

Abstrak

Upaya untuk mencari model dan formulasi yang tepat dan ideal dalam pembudayaan Pancasila pada era pasca reformasi menjadi pokok perhatian penting dalam kajian Pancasila saat ini. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada era yang mengalami perubahan dan dinamika masyarakat yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri. Saat ini, negara diperhadapkan pada lunturnya nilai-nilai Pancasila yang berdampak pada rendahnya rasa cinta tanah air, gerakan intoleransi, radikalisme, fundamentalisme, korupsi, dan terorisme semakin tumbuh dan berkembang di negara yang disebut sebagai negara Pancasila. Bagaimana Pancasila dapat diamankan dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat, masih menyisahkan tanda tanya besar. Tidak adanya model yang ideal dan tepat sebagai contoh dianggap sebagai pemicu dan akar persoalan pembudayaan Pancasila kurang efektif dijalankan. Selain itu, berbagai program lembaga negara untuk melakukan pembudayaan Pancasila dinilai masih belum serius karena masih ditemukan perbedaan pendekatan dan materi dalam melakukan pembudayaan Pancasila antar lembaga negara. Dampaknya masyarakat menjadi bingung terkait

nilai-nilai Pancasila yang mana yang akan dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan kritis atas berbagai konsep dan model pembudayaan Pancasila yang berkembang pada era pasca reformasi dan tawaran model pembudayaan Pancasila yang perlu diformulasikan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian diperoleh dari observasi dan wawancara, serta kajian pustaka. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis (*Critical discourse analysis*), interpretasi, dan induktif-deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembudayaan Pancasila dapat dilakukan melalui media kreatif. Rumah Garuda menjadi salah satu tempat untuk dapat mengembangkan formula dan format, serta media kreatif yang tepat dan ideal dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila.

Kata Kunci: Rumah Garuda; Pancasila; Pembudayaan; Media Kreatif.

A. Pendahuluan

Pembudayaan Pancasila menjadi problematika yang penting dan menjadi perhatian masyarakat, serta pemerintah pada era pasca-reformasi. Problem mendasar yang ditanyakan terkait pembudayaan nilai Pancasila ialah, *pertama*, menyangkut siapa aktor utama yang berperan penting dalam proses pembudayaan Pancasila pada era pasca-reformasi? Ketika era reformasi mengarahkan keterbukaan, demokratisasi, dan de-ideologisasi, serta desentralisasi kewenangan antara pusat dan daerah, persoalan aktor utama sebagai pemegang kunci untuk merumuskan model, desain, dan format untuk melakukan dan melaksanakan pembudayaan Pancasila menjadi persoalan pada era pasca-reformasi. Problem pertama ini terjadi karena fungsi lembaga negara yang dulu pernah ada, dikenal sebagai BP-7 (Badan Pembinaan Pendidikan dan Pelaksanaan P4) dibubarkan bersamaan gerakan reformasi pada tahun 1999. Pembubaran lembaga tersebut telah membawa konsekuensi pada persoalan siapa yang dapat menjadi *leading sector* untuk melakukan pembudayaan Pancasila? *Kedua*, bagaimana format dan formula pembudayaan Pancasila pada era pasca-reformasi dalam menghadapi tantangan perubahan sosial dan politik yang selalu berkembang.

Isu tentang radikalisme, fundamentalisme, terorisme, budaya barat/asing yang masuk, gerakan intoleransi,

kebijakan negara yang tidak Pancasila, dan masyarakat yang masih banyak mengabaikan nilai-nilai Pancasila semakin menguat. Persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya merumuskan format dan formula yang ideal dan tepat dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan dan kebudayaan dianggap menjadi unsur penting dan mendasar untuk menjadi pintu masuk pembudayaan nilai-nilai Pancasila. *Ketiga*, polemik hilangnya mata pelajaran Pancasila sebagai kurikulum wajib pada pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi dalam sistem pendidikan nasional sejak terbitnya Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi persoalan dalam melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila secara formal, dalam artian dasar pembudayaan Pancasila di kurikulum nasional di Indonesia tidak ada (Republik Indonesia, 2003). *Keempat*, proses dan perkembangan media digital yang tidak diprediksi sebelumnya telah membawa perubahan secara signifikan dalam aspek pemahaman, penilaian, dan pemaknaan akan segala sesuatu. Misalnya, laporan media massa secara khusus media digital telah menjadi pilihan utama masyarakat sebagai sumber informasi utama. Perkembangan dan perubahan media informasi telah membawa perubahan perilaku masyarakat tentang kehidupan hari ini. Kondisi ini yang menjadi tidak dipertimbangkan sejak awal dalam

upaya untuk melakukan pembudayaan Pancasila.

Proses pembudayaan Pancasila dinilai bertujuan untuk mencari format dan formula baru dimana perubahan era kepemimpinan dan kelembagaan di pemerintahan pada era pasca reformasi. Kebutuhan akan format dan formula baru dalam pembudayaan Pancasila sebagai sistem nilai hidup bernegara, berbangsa, dan bernegara dapat ditelusuri dari Kongres Pancasila V tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada dengan tema Strategi Pembudayaan Nilai-Nilai Pancasila dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Meskipun hasil kongres ini tidak spesifik dapat merumuskan format dan formula baru dalam pembudayaan Pancasila di ranah pendidikan dan kebudayaan, namun catatan penting dari hasil Kongres Pancasila V tahun 2013 ialah pentingnya pembudayaan Pancasila pada lembaga lembaga negara seperti yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Kongres Pancasila V ini sebagai kelanjutan dari Kongres Pancasila III yang membahas tentang Harapan, Peluang, dan Tantangan, Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila yang diselenggarakan di Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2011. Tujuan dari Kongres Pancasila III diarahkan kepada penggalan model model pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Hasil kongres Pancasila III ini salah satunya menyatakan bahwa pembudayaan nilai-nilai Pancasila harus bersifat wajib bagi penyelenggara negara, politisi, masyarakat pers, dunia usaha, dan masyarakat umum. Pendekatan yang perlu didorong dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, budaya, dan keteladanan dari penyelenggara negara.

Bertitik tolak dari perdebatan dan dinamika tentang cara pandang dalam merumuskan dan memformulasikan model pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat yang tepat dan ideal pada tiga ranah yaitu mulai dari tingkat yudikatif, legislatif, dan eksekutif untuk kehidupan bernegara dan masyarakat untuk kehidupan

berbangsa dan bermasyarakat, maka penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti dan diangkat sebagai salah satu bentuk untuk menawarkan tentang bagaimana format dan formula yang tepat dan ideal dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada era pasca reformasi. Berdasarkan hasil penelusuran literatur menunjukkan bahwa upaya untuk merumuskan format dan formula pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat belum banyak ditemukan secara khusus dalam jurnal *online*. Namun gagasan dan ide ide besar tentang pentingnya pembudayaan nilai-nilai Pancasila sudah dapat tergambarkan dalam berbagai pemberitaan di media massa online yang menekankan pentingnya pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat dan generasi muda. Beberapa tahun terakhir ini, studi tentang Pancasila yang banyak diminati lebih memfokuskan pada implementasi nilai-nilai Pancasila ke dalam pendidikan baik ditingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan tinggi. Dalam penelitian ini banyak melakukan eksplorasi atas cara implementasi materi Pancasila kepada peserta didik. *Transfer of knowledge*, menjadi titik tekan dalam studi dan kajian tentang implementasi Pancasila dalam pendidikan. Penelitian Handayani dan Dewi menjelaskan implementasi Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila dalam penelitian ini diartikan sebagai dasar negara yang diterjemahkan sebagai fondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia dianggap telah memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa bangsa lainnya (Handayani dan Dewi, 2021). Penelitian ini tidak spesifik menguraikan secara konseptual tentang formula dan format yang ideal dan tepat dalam melakukan implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Tulisan ini lebih banyak mengeksplorasi nilai-nilai Pancasila dan cara memaknai Pancasila sebagai dasar negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnamukti, Dhamayanti, Maharani, dan Putri menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila pada kehidupan mahasiswa di kampus dan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam penelitian ini lebih ditekankan pada etika dan moral dalam menjalani kehidupan bernegara (Krisnamukti, Dhamayanti, Maharani, dan Putri, 2020). Hasil penelitian ini menunjukkan cara mahasiswa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus sebagai sistem nilai dan etika dengan cara menghormati dosen, saling menghormati antar pemeluk agama, tolong menolong, dan mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa.

Berdasarkan hasil dari tinjauan pustaka yang dilakukan, penelitian ini akan memfokuskan pada kerangka model pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang ideal dan tepat dan kreatif. Model yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada penjelasan Mirdad bahwa model merupakan suatu rancangan yang dibuat khusus dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis untuk diterapkan dalam suatu kegiatan. Selain itu model dapat disebut dengan desain yang dirancang sedemikian rupa untuk kemudian diterapkan dan dilaksanakan (Mirdad, 2020). Model dalam penelitian ini dimaknai lebih luas, tidak hanya sekedar model pembelajaran sebagaimana kebanyakan orang memahami secara kerdil tetapi aspek keluasan pengertian tentang model untuk memberikan kerangka pikir dalam membahas dan menguraikan model pembudayaan Pancasila sebagaimana yang dimaksud dalam penelitian ini. Tulisan Kitley berjudul *Pancasila in the Minor Key: TVRIs 'Si Unyil Models Child* menguraikan tentang salah satu model pembudayaan Pancasila yang ia analisis dari program seri Si Unyil yang ditayangkan di TVRI sebagai salah satu bentuk model anak Pancasila. Boneka Si Unyil yang muncul pertama kali pada tahun 1981an sebagai salah satu program televisi TVRI menjadi sarana untuk melakukan

pembudayaan Pancasila. Program anak yang disiarkan pada televisi dengan nama Si Unyil menjadi bagian penting sebagai sarana untuk melakukan penanaman nilai tertentu yang dilakukan oleh negara. Kitley memaparkan pandangannya dalam tulisan tersebut bahwa program Si Unyil ini sebagai wujud pengakuan atas perbedaan budaya tetapi juga menghapus batas-batas ruang dan sekat perbedaan tersebut, menghargai keunikan, dan potensi setiap pemeran yang berbeda-beda menjadi bagian dari cerita dalam episode boneka Si Unyil. Program tersebut secara politis telah berpengaruh secara signifikan untuk membentuk persatuan dan keluarga Pancasila (Kitley, 1999).

Pendekatan dalam penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan model dan media untuk menganalisis persoalan tentang pembudayaan nilai-nilai Pancasila yang berkembang saat ini. Tujuan penelitian ini ialah dihasilkan rumusan format dan formula yang tepat dan ideal untuk melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Dalam kajian sebelumnya, terkait implementasi nilai-nilai Pancasila masih memfokuskan pada implementasi nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan atau kurikulum formal sebagaimana yang dilakukan oleh Danniarti menjelaskan bahwa implementasi nilai-nilai Pancasila di tingkat SMP sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan nilai wawasan kebangsaan. Studi Danniarti dilakukan di SMP N 7 Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi nilai-nilai Pancasila yang dilakukan oleh siswa dengan menjalankan ibadah *sholat*, menghormati orang lain, dan menjabarkan nilai-nilai Pancasila sebagai bentuk kerangka pikir dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Danniarti, 2017).

B. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Yogyakarta pada periode bulan April-Mei 2021. Penelitian ini memfokuskan pada Rumah Garuda sebagai

salah satu tempat penelitian. Sumber data penelitian diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer melalui observasi lapangan dan wawancara. Sedangkan data sekunder dari hasil kajian yang dilakukan melalui kajian literatur buku, jurnal ilmiah, dan fenomena yang berkembang tentang Pancasila. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kritis (*Critical discourse analysis*), interpretasi, dan induktif-deduktif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Re-definisi atas Pancasila

Pancasila perlu kembali dipahami dan dimaknai secara nasional dan universal. Dalam pokok pembahasan pada sub bab ini, penelitian ini perlu memosisikan dan menegaskan pengertian dan makna Pancasila sebagai dasar pelaksanaan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Selama ini perdebatan yang muncul tentang Pancasila tidak adanya kesepakatan dan kesepahaman tentang posisi Pancasila diletakkan sebagai apa. Berbagai tafsir dan definisi dalam makalah, jurnal, buku ajar, dan buku referensi terkait Pancasila masih terjadi perbedaan dalam meletakkan pengertian dan pemahaman tentang Pancasila. Dalam penelitian ini definisi Pancasila merujuk pada pandangan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila* menyatakan bahwa Pancasila sudah disepakati bersama sebagai pandangan hidup, ideologi, dan dasar negara (BPIP, 2020). Pengertian ini menjadi titik tolak penting untuk merumuskan formula dan format pembudayaan Pancasila yang ideal dan tepat pada era sekarang ini. Pemahaman Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa meletakkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumber nilai dan dasar nilai

dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi, dimaknai sebagai ideologi negara dan bangsa, sistem ideologi negara menjadi pedoman dalam dasar kebijakan dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, secara jelas menjadi dasar penorma dan dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya untuk melakukan redefinisi atas Pancasila menjadi penting. Penelitian ini meletakkan definisi pada ketiga hal tersebut sebagai titik pijak dalam merumuskan format dan formula pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Meninjau Model Pembudayaan Pancasila Dulu dan Sekarang

Pembudayaan Pancasila merupakan istilah populer yang muncul sejak pasca reformasi. Istilah untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila pada awal mula dikenal dengan istilah ‘pengamalan’ dan ‘penghayatan’ Pancasila. Kata pengamalan dan penghayatan muncul dari konsep yang dirumuskan oleh pemerintah Soeharto dengan sebutan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) sebagai model awal pembudayaan Pancasila pada periode pertama tahun 1978an. Kebijakan ini dilegitimasi melalui Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa). Dalam peraturan ini tidak secara eksplisit dijelaskan model dan bentuk pembudayaan Pancasila dalam konteks pengamalan dan penghayatan kepada masyarakat, penyelenggara negara, dan kehidupan berbangsa. Dasar alasan P4 disebut sebagai *Eka Prasetya Pancakarsa* dijelaskan lebih

lanjut dalam naskah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tersebut. Makna tersebut dijelaskan dalam lampiran naskah P4 bahwa ekaprasetia berarti suatu tekad yang tunggal, janji yang luhur kepada diri sendiri bahwa sadar akan kodratnya sebagai makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Manusia Indonesia harus mampu mengendalikan diri sendiri dan kepentingannya, agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat.

Secara lebih lanjut, disebutkan bahwa kesadaran ini menjadi modal dasar serta mendorong tumbuhnya *karsa* pribadi untuk menghayati dan mengamalkan kelima sila dari Pancasila, yang karenanya dinamakan Pancakarsa (Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978).

Semangat yang diwujudkan dalam proses pengamalan Pancasila pada waktu itu adalah bagian dari perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Penegasan pernyataan ini tertuang dalam bagian penutup Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, upaya pembudayaan Pancasila pada dasarnya perlu diperjuangkan sebagai agenda utama dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat di Indonesia. Sungguh ironis, jika suatu kegiatan pembudayaan Pancasila hanya sekedar kegiatan pragmatis atau *instant*. Dalam catatan dokumen tersebut istilah yang muncul ialah pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dalam judul tersebut tidak tertulis secara eksplisit “nilai Pancasila”, hal ini yang membedakan dengan proses

penyusunan istilah tentang pengamalan atau implementasi yang selalu diikuti dengan istilah “nilai-nilai Pancasila” dalam berbagai literatur yang muncul. Penelitian ini menemukan bahwa telah terjadi pergeseran penggunaan istilah dari “penghayatan dan pengamalan Pancasila” menjadi “implementasi nilai-nilai Pancasila”, kemudian berkembang varian yang lain menyebut sebagai “pembudayaan nilai-nilai Pancasila”, ‘pembumian Pancasila/pembumiaan nilai-nilai Pancasila’, istilah pembumian Pancasila lebih bermakna mengkerdikan Pancasila karena “membumikan” dianggap mengubur Pancasila karena dimaknai masuk ke bumi berarti mengubur. Istilah lain menyebut ‘internalisasi nilai-nilai Pancasila’. Dalam P4 dijabarkan makna dari setiap sila sila Pancasila sebagai kerangka acuan pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila secara bulat dan utuh, kemudian dikenal dengan istilah butir butir Pancasila sebanyak 36 butir.

Model pembudayaan Pancasila pada era pemerintahan Soeharto menunjukkan konsepsi yang cukup komprehensif dalam memosisikan Pancasila. *Pertama*, P4 ditegaskan bukan menafsirkan Pancasila sebagai dasar negara, hal tersebut tertuang dalam pasal 1 Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa) menyebutkan bahwa “pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini tidak merupakan tafsir Pancasila sebagai Dasar Negara, dan juga tidak dimaksud menafsirkan Pancasila Dasar Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Batang Tubuh dan Penjelasannya”. *Kedua*, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan

Pancasila dituangkan dalam rumusan yang sederhana, jelas dan mudah dipahami maknanya (pasal 2, Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978). *Ketiga*, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ini merupakan penuntun dan pegangan hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara bagi setiap warganegara Indonesia, setiap penyelenggara Negara serta setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik di Pusat maupun di Daerah dan dilaksanakan secara bulat dan utuh (pasal 4, Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978). Ketiga posisi tersebut telah tertuang di dalam Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978. Penjelasan ini terlewatkan dalam ulasan dan kajian yang dilakukan oleh Fachrudin dalam menjabarkan tafsir Pancasila. Pancasila yang diulas oleh Fachrudin banyak melihat aspek politik Pancasila dan asumsi bahwa setiap rezim memiliki tafsir atas Pancasila sendiri sejak era Soekarno, Soeharto, hingga pasca reformasi (Fachrudin, 2018). Ulasan tentang perubahan lembaga terkait Pancasila, penyimpangan tafsir Pancasila menjadi pilar tidak diulas oleh Fachrudin.

Uraian dan tinjauan secara singkat tentang model pembudayaan Pancasila yang dikembangkan pada masa lalu belum banyak dijabarkan dalam studi sebelumnya. Oleh karena itu tidak cukup banyak literatur yang ditemukan dan dapat menjelaskan secara komprehensif tentang model pembudayaan Pancasila yang dikembangkan pada masa lalu. Penelitian ini telah mengidentifikasi pendekatan dan model yang dikembangkan pada era pemerintahan Soeharto terkait pembudayaan Pancasila yang lebih memfokuskan pada program kegiatan, pendidikan, dan pelatihan. Program kegiatan

diarahkan pada kelompok masyarakat, penyelenggara negara. Bentuk kegiatan berupa lomba. Sedangkan pendidikan dan pelatihan melalui kurikulum dan ko kurikulum yang dirancang secara sistematis. Kurikulum mulai pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Untuk pendidikan dasar sampai pendidikan menengah, dikenal dengan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dan menjadi prasyarat untuk ujian nasional. Mata pelajaran PMP merupakan mata pelajaran yang masuk dalam Ujian Nasional yang disebut EBANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) dan EBTA (Evaluasi Belajar Tahap Akhir). EBTA merupakan ujian untuk menguji mata pelajaran yang bersifat non ebtanas (Suwarta, 2019). Dalam konteks pelatihan dan pendidikan (Diklat) berbagai diklat tentang P4 diselenggarakan oleh lembaga negara seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kemendagri, dan BP-7 sebagai lembaga yang secara khusus untuk melakukan pembudayaan Pancasila di lingkungan pendidik, guru, dosen, pejabat negara, dan pegawai negeri sipil dari pusat sampai daerah. Media sosialisasi yang digunakan berupa media elektronik dan cetak seperti televisi, radio, koran, papan nama, dan poster.

Pendekatan yang dilakukan dalam pembudayaan Pancasila pada masa lalu menggunakan pendekatan dialog, interaktif, partisipatif. Hal ini dapat terlihat dari berbagai dokumen P4 yang dicetak oleh BP-7 untuk menjadi bahan pendidikan dan pelatihan. Model yang dibuat terencana, sistematis dan terpusat. Pada era ini belum dikenal media modern dan media sosial yang memiliki banyak varian seperti televisi swasta, *android*, yang berkembang pesat, media sosial seperti *face book*,

twitter, ig, whatshapp, tiktok belum dikenal pada era itu. Pada era pemerintah Soeharto perkembangan media massa secara umum baik cetak dan elektronik tidak sebanyak pada era pasca reformasi sehingga kontrol pemerintah atas media cukup kuat dan ketat untuk melakukan screening isi berita yang disampaikan kepada masyarakat. Hal ini berbeda dengan era pasca reformasi, perkembangan media sudah masuk pada wilayah kehidupan individu. Kontrol atas media tidak seketat dan kuat pada era dulu, personal media yang sudah masuk pada ranah individu sulit dikontrol oleh negara.

Reformasi pada tahun 1999 menjadi era baru dalam melakukan pembudayaan Pancasila. Pergantian sistem pemerintahan dan kepemimpinan nasional telah memunculkan tatanan sosial dan politik yang berubah. Pemahaman dan pemaknaan akan Pancasila juga mengalami perubahan dan dinamika. Perhatian yang penting dalam proses pembudayaan Pancasila ialah persoalan pencarian model lembaga pengawal Pancasila pasca dibubarnya BP-7. Proses perumusan model lembaga ini baru muncul pada tahun 2017 dengan terbentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (Peraturan Presiden Nomor 54/2017). Satu tahun kemudian, Unit Kerja Presiden tersebut berganti nama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tantangan dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara pada era pasca reformasi semakin kompleks hal ini telah menyadarkan segenap elemen bangsa

terutama elit politik untuk kembali kepada Pancasila. Pasca reformasi telah membawa arus perubahan tatanan sosial dan politik kenegaraan Indonesia menuju tantangan sosial dan politik liberal. Kaelan menjelaskan dalam tulisannya berjudul *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*, liberalisasi dalam konteks yang dibahas oleh Kaelan ialah suatu kenyataan obyektif dan empiris praktek penyelenggaraan negara yang telah menyimpang dari falsafah dan filsafat Pancasila. Pancasila dikubur oleh bangsa sendiri hampir selama 14 tahun sejak reformasi 1998 (Kaelan, 2015). Realitas obyektif tersebut telah membawa konsekuensi atas model, format, dan formula pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Model pembudayaan Pancasila dalam konteks Indonesia pasca reformasi dilakukan melalui berbagai macam model dan bentuk. Model yang nampak terlihat, dapat ditelusuri dari kegiatan berbagai lembaga penyelenggara kegiatan pembudayaan Pancasila. Jika dulu modelnya terpusat sekarang beragam. Hampir setiap lembaga dapat menyelenggarakan pembudayaan Pancasila. Sejak pasca-reformasi, MPR RI mengawali kegiatan sosialisasi dengan nama 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara pada akhir tahun 2009, model tersebut dinilai kurang berhasil karena mendapatkan kritik dari masyarakat sampai uji materiil ke Mahkamah Konstitusi yang kemudian dibatalkan pada tahun 2014. Kemudian Menteri Dalam Negeri menyusun model pembudayaan Pancasila melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, dalam peraturan ini dijelaskan tentang materi dan bentuk

kegiatan pelaksanaan Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Bentuk kegiatan yang digunakan dalam sosialisasi nilai-nilai wawasan kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika melalui pelatihan, outbound, lomba, diskusi, seminar dan lokakarya (pasal 5, Permendagri No.71/2012).

Konteks pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dilakukan dengan berbagai model. Contoh yang dilakukan di Yogyakarta yaitu diselenggarakannya **“Sinau Pancasila dan sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika”**. Sinau Pancasila sebagai upaya untuk melakukan pembudayaan kepada masyarakat diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY. Begitu juga Sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika yang mulai diselenggarakan pada tahun 2021. Reformasi telah melahirkan berbagai model pembudayaan Pancasila dan juga kaburnya *leading sector* dalam upaya melakukan pembudayaan Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Persoalan ini kemudian berpengaruh dengan tidak efektif dan efisiennya penyelenggaraan kegiatan pembudayaan Pancasila yang dilakukan oleh pemerintah karena terjadi tumpang tindih peraturan dan lembaga penyelenggara dengan pemahaman dan pengertian Pancasila yang berbeda. Hal ini yang menyebabkan model pembudayaan Pancasila pada era pasca-reformasi dinilai masih membingungkan dan belum jelas arah dan tujuannya. Apabila Pancasila dikatakan sebagai sistem nilai normatif (Kian, Purwanti, Sabri, 2021). Pancasila sudah seharusnya menjadi dasar nilai dan norma dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan bahwa

belum ada model, format, dan formula yang muncul dan dikembangkan oleh lembaga negara dalam pembudayaan Pancasila yang ideal dan tepat sejak pasca reformasi.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa bentuk model yang diterapkan masih mereproduksi model yang lama. Model tersebut yang kemudian dikaitkan dengan dinamika dan perkembangan zaman melalui pendekatan teknologi informasi yang dulu tidak ada, sekarang digunakan sebagai media yang dianggap “kreatif” misalnya membuat lomba film pendek, lomba *tiktok*, lomba animasi, lomba baca puisi, dan berbagai bentuk lomba yang menggunakan media teknologi informasi. Jika dulu model pembudayaan Pancasila menggunakan teknologi informasi hanya sebatas televisi, radio, dan media cetak, maka sekarang lebih banyak pilihan saluran media karena perkembangan teknologi informasi. Kelemahan dari model sekarang ialah gagalnya kontrol negara atas media yang berkembang, sehingga fungsi dan peran media mulai dikendalikan oleh individu melalui *gadget*, *android*, dan personal media yang dibuat oleh masing masing individu.

Berbagai studi yang dilakukan tentang model terkait Pancasila masih lebih banyak memfokuskan model pembelajaran dengan pendekatan beberapa metode yang diadopsi dari luar negara. Misalnya studi Syahrir menjelaskan model *Contextual Teaching and Learning* (CTL) yang digunakan untuk melihat pengaruhnya dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di sekolah dasar. Hasil studi ini menunjukkan bahwa metode ini dinilai memiliki pengaruh dalam terkait pemahaman siswa tentang nilai-nilai Pancasila (Syahrir, 2020). Secara

umum berbagai studi tentang model untuk melakukan pembudayaan Pancasila lebih banyak memfokuskan pada pendidikan formal dan pembelajaran di kelas, serta menjawab problem parsial atau kasus tertentu seperti penelitian yang dilakukan Mulyoto yang membuat pengembangan modul praktikum mata kuliah Pancasila dengan model *project citizen* untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi kepada mahasiswa (Mulyoto, 2020). Dalam penelitian menunjukkan penggunaan modul praktikum *project citizen* mampu menumbuhkan sikap dan keterampilan dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada mahasiswa.

3. Rumah Garuda: Media Kreatif dan Inovatif dalam Pembudayaan Pancasila

Penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dianggap makin memudar. Hal ini menjadi dasar pentingnya pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Kondisi pudarnya penerapan nilai-nilai Pancasila diperkuat dengan penelitian Regiani dan Dewi yang menyebutkan bahwa munculnya berbagai masalah yang terjadi di Indonesia karena tidak diterapkannya nilai-nilai Pancasila (Regiani dan Dewi, 2021). Formula dan format model pembudayaan Pancasila dalam kehidupan masyarakat dapat ditelusuri dari Rumah Garuda sebagai salah satu tempat yang melahirkan berbagai macam model untuk melakukan pembudayaan Pancasila pada era pasca reformasi. Rumah Garuda berdiri pada tahun 2011 yang diiniasi oleh Nanang Rakhmat Hidayat atau dikenal sebagai Nanang Garuda.

Rumah Garuda pada awalnya dimaksudkan untuk mensosialisasikan

dan memperkenalkan lambang negara Garuda Pancasila yang terlupakan oleh generasi muda dan penyelenggara negara. Ide dasar pendirian Rumah Garuda ini untuk mengisi kekosongan sejarah terkait kelahiran lambang negara serta memberdayakan limbah riset dari tesis yang dilakukan oleh Nanang Garuda dengan tema “Mencari telur Garuda”. Gagasan Rumah Garuda ini diharapkan menjadi pengingat semua yang datang untuk mengetahui sejarah lahirnya lambang negara dengan tujuan bahwa kita harus tahu bahwa kita adalah bangsa yang berjiwa garuda (Hasil wawancara dengan Nanang Garuda, 6 Mei 2021 13:00, di Yogyakarta).



Gambar 1. Pejuang Garuda
(Sumber: dokumen foto pribadi peneliti, 2021)

Gambar 1 di atas merupakan ikon patung yang berada di Rumah Garuda sebagai simbol perjuangan bahwa suatu cita cita dan lambang negara perlu diperjuangkan.

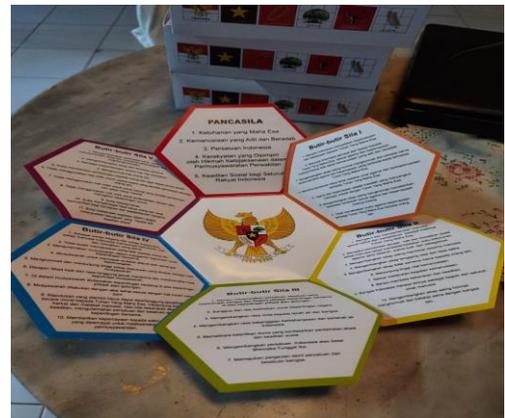




Gambar 2 Koleksi Rumah Garuda
(Sumber: dokumen foto pribadi peneliti, 2021)

Gambar 2 di atas menunjukkan koleksi Rumah Garuda. Rumah Garuda memiliki sejumlah koleksi barang yang bersifat edukatif yang menjelaskan tentang sejarah lahirnya lambang negara garuda Pancasila mulai dari proses perancangan lambang negara sampai pada sejarah berbagai macam bentuk bentuk garuda yang ditemukan. Rumah Garuda menjadi media kreatif sebagai salah satu bentuk format dan formula dalam merumuskan model pembudayaan nilai-nilai Pancasila bagi masyarakat dan generasi muda. Pendekatan yang dikembangkan di Rumah Garuda ini menggunakan pendekatan interaktif, kreatif, dan inovatif dalam menampilkan dan memvisualisasikan sejarah lambang negara dan Pancasila secara umum. Model pembudayaan Pancasila yang dikembangkan di Rumah Garuda ini berupa proses penciptaan aneka permainan dan alat peraga yang dapat digunakan untuk menarik perhatian dan membangun imajinasi masyarakat dan generasi muda tentang Indonesia dan Pancasila seperti kamus lipat Pancasila, *puzzle* Pancasila, permainan ular elang Pancasila, film superhero Garuda, Kisah lencana Negara (kerjasama dengan BPIP, 2019), kalender sejarah bangsa Indonesia, wayang suluh,

wayang garuda, wayang pulau Indonesia, wayang purba, wayang tokoh tokoh perancang Pancasila dan lambang negara garuda Pancasila.



Gambar 3. Media Kreatif Pembudayaan Pancasila
(Sumber: dokumen foto pribadi peneliti, 2021)

Gambar 3 di atas menunjukkan format dan formula model pembudayaan Pancasila yang dikembangkan di Rumah Garuda. Kamus lipat yang berisi tentang butir Pancasila sebagai upaya untuk memperkenalkan kembali nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda, kemudian puzzle Pancasila yang berupaya untuk memberikan pemahaman dan logika berpikir tentang bentuk lambang negara Garuda Pancasila. Rumah Garuda sebagai tempat atau wadah pengembangan format dan formula untuk model pembudayaan nilai-nilai Pancasila menjadi sangat penting. Produk yang

dikembangkan di Rumah Garuda ini menjadi produk kreatif dalam melakukan pembudayaan Pancasila bagi generasi muda secara umum dan masyarakat luas. Format dan formula pembudayaan Pancasila pada dasarnya tidak hanya sekedar menggunakan media teknologi informasi tetapi juga terdapat konsep model pembudayaan Pancasila dengan media dan alat peraga yang memadai untuk menanamkan memori kolektif generasi muda tentang sejarah bangsa dan nilai-nilai Pancasila.

Rumah Garuda menjadi contoh menarik untuk melakukan proses kreatif dalam pembudayaan Pancasila. Sampai sejauh ini belum ada lembaga negara yang memiliki pusat inovasi dan kreatif untuk pengembangan model pembudayaan Pancasila bagi masyarakat selain hanya reproduksi konten melalui pendekatan media teknologi informasi. Upaya untuk menciptakan dan membuat alat peraga, media yang unik dan menarik, serta edukatif belum banyak dilakukan. Saat ini, pedoman untuk melakukan pembudayaan Pancasila masih belum memiliki acuan dan standar yang sama antar lembaga negara, bahkan termasuk di masyarakat. Sehingga masyarakat mengalami kebingungan atas upaya pembudayaan Pancasila yang berkembang sejak pasca-reformasi karena berbagai program yang muncul masih terjadi perbedaan dari konsep, materi, dan metode yang digunakan.

Rumah Garuda dapat menjadi *role model* yang dapat digunakan untuk membuat standarisasi dan pedoman umum dalam melakukan pembudayaan Pancasila di berbagai aspek kehidupan. Upaya untuk melakukan pembudayaan Pancasila dapat saja mengalami kegagalan ketika banyak lembaga negara yang menangani kegiatan pembudayaan

tidak memiliki format, model, dan formula yang tepat dan ideal untuk diterapkan secara sistematis dan menyeluruh. Sebagaimana telah diingatkan oleh Acemoglu dan Robinson bahwa negara banyak mengalami kegagalan hari ini karena banyak lembaga ekstraktif di dalam institusi negara tersebut (Acemoglu dan Robinson, 2012:368). Lembaga ini diilustrasikan sebagai lembaga yang hanya mengambil sumber sumber dana dari negara dan menjalankan kegiatan rutin yang sudah ada tanpa ada upaya upaya yang lebih serius untuk membangun visi dan memajukan bangsa dan negara atau mengembalikan sumber sumber dana tersebut untuk kesejahteraan rakyat dan masa depan generasi selanjutnya.

Penelitian ini juga memberikan catatan kritis berdasarkan hasil identifikasi atas fenomena munculnya kegiatan berkaitan Pancasila dan atau kebangsaan sejak pasca-reformasi ini antara lain:

1. Belum bersatu. Artinya banyak kelompok, komunitas, lembaga berkaitan kebangsaan atau Pancasila membuat agenda-agenda mengatasnamakan kebangsaan namun tidak akur satu dengan yang lain, bahkan terdapat konflik kepentingan dari cara mendekati program dan materi kegiatan yang disampaikan.
2. Saling berkompetisi. Artinya banyak lembaga/organisasi/komunitas membuat kegiatan berlabel kebangsaan justru mengarah pada saling berkompetisi satu dengan yang lainnya, berebut proyek semata.
3. Kurangnya implementasi di lapangan. Dalam praktiknya, lembaga / organisasi / komunitas tersebut memiliki ide dan konsep yang kreatif. Namun dalam

implementasinya, ide atau konsep tersebut tidak terlaksana. Lembaga/organisasi/komunitas tersebut seringkali kebingungan untuk memulai.

4. Terlalu banyak mazhab/tafsir atas Pancasila.
5. Tidak memiliki tujuan yang jelas.
6. Tidak memiliki perencanaan yang baik dan berkelanjutan.
7. Tidak memiliki konsep kaderisasi yang baik.
8. Kegiatan yang dibuat hanya untuk eksistensi/pencitraan semata dan belum menyentuh penjiwaan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ilmu pengetahuan.

Demikian peta besar yang terjadi terkait upaya pembudayaan Pancasila sejak pasca reformasi.

D. Simpulan

Pembudayaan nilai-nilai Pancasila merupakan proses yang secara terus menerus diupayakan dan dikembangkan mengikuti perkembangan dan dinamika masyarakat. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan atas model pembudayaan Pancasila. Merumuskan model yang tepat dan ideal pada setiap era menjadi penting untuk secara terus menerus dan berkesinambungan dilakukan. Perubahan model pembudayaan harus diadaptasi pada kondisi saat itu, karena setiap era selalu memiliki tantangan dan kebutuhan yang berbeda. Rumah Garuda menjadi salah satu model dalam rangka pembudayaan nilai-nilai Pancasila pada era pasca reformasi, dimana kekosongan format dan formula pembudayaan Pancasila yang tepat dan ideal masih berproses. Namun keberadaan Rumah Garuda ini dapat menjadi bagian penting dalam penguatan nilai-nilai Pancasila serta memperkuat pembudayaan Pancasila pada setiap bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Acemoglu.D, Robinson.J.A.(2012). *Why Nations Fail the Origins of Power, Prosperity, and Poverty*, New York: Crown Publishers.
- BPIP.(2020). *Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila*. Jakarta: BPIP.
- Danniarti. Rahma.(2017). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila sebagai Pendukung Tumbuh Kembang Wawasan Kebangsaan pada Mata Pelajaran PPkn di SMP Negeri 7 Palembang, *JMKSP Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan, Volume 2, No. 2, Juli-Desember 2017, hal.187-203*.
- Fachrudin.Azis.A.(2018). *Polemik Tafsir Pancasila*. Yogyakarta: CRCS. UGM.
- Handayani. P.A, Dewi.D.A.(2021). Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No.1 Juni 2021, hal. 6-12*.
- Kaelan.(2015). *Liberalisasi Ideologi Negara Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kitley.Philip.(1999). Pancasila in the Minor Key: TVRI's "Si Unyil" Models the Child, *Source: Indonesia, Oct., 1999, No. 68 (Oct., 1999), pp. 129-152, Published by: Cornell University Press; Southeast Asia Program Publications at Cornell University .Stable URL: https://www.jstor.org/stable/3351297*.
- Krisnamukti.B.P, Dhamayanti.K.G.H, Maharani.Y., Putri, Shania Aliyya.(2020). Implementasi Nilai Pancasila dalam Kehidupan Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang. *Jurnal Rontal Keilmuan PKn, Vol.6/No.1/April 2020,hal. 66-72*.
- Ketetapan MPR RI.(1978). *Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat*

- Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
- Kian. L, Purwanti.Ani, Sabri.M.(2021). Internalisasi dan Instansionalisasi Kebijakan Ekonomi Pancasila, *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan, Vol. 01, No. 01, April 2021, halaman 45-56.*
- Mirdad.Jamal.(2020). Model-Model Pembelajaran (Empat Rumpun Model Pembelajaran), (*Indonesia jurnal Sakinah) Jurnal Pendidikan dan Sosial Islam, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 14-23.*
- Mulyoto.Galih Puji.(2020). Pengembangan modul praktikum matakuliah Pancasila dengan model project citizen untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada mahasiswa, *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Vol. 17 No. 1 Tahun 2020, hal. 67 – 80*
- Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.(1978). Lampiran Penjelasan Naskah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, *dalam Ketetapan MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).*
- Nanang Garuda.(2021). Wawancara. Yogyakarta, 6 Mei 2021 13:00.
- Peraturan Presiden. (2017). Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Presiden. (2018). Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2012). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- Republik Indonesia.(2003). Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Regiani. Ega, Dewi. Dinie Anggraeni.(2021). Pudarnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Masyarakat di
- Era Globalisasi, *Jurnal Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 Juni 2021, hal.30-38.*
- Suwarda.T.H.(11 Desember 2019). “Ini Sejarah Ujian Nasional di Indonesia” , <https://mediaindonesia.com/humaniora/277115/inisejarah-ujian-nasional-di-indonesia.html>, diakses 14 Mei 2021 22:00.
- Syahrir.Umrah Ridawati.(2020). Pengaruh Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) Terhadap Pemahaman Nilai-nilai Pancasila Pada Pembelajaran Pkn Siswa SD Negeri 7 Letta Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, *Skripsi, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.*